

Literasi Politik dan Media Sosial

Oleh Muchamad Yuliyanto



TULISAN ini bermula dari pengabdian masyarakat yang mendeskripsikan bahwa pada konteks demokrasi sejak 2010 secara umum generasi milenial mengetahui informasi politik seperti pemilu legislatif, pilpres, dan pilkada melalui media *online*, terutama media sosial (medsos). Dalam perbincangan politik dan dinamika demokrasi maka kalangan pelajar sebagai pemilih pemula sering dipandu terpaan informasi dari medsos yang sekaligus jadi ruang diskusi untuk mengekspresikan gagasan dan pandangan pribadi.

Mereka yang dikategorikan generasi milenial terus didorong berpartisipasi politik sebagai warga negara yang bertanggung jawab atas masa depan bangsa dan negara. Medsos sebagai pilar baru dalam perpolitikan ikut menciptakan komunikasi yang kondusif karena dapat memenuhi informasi sekaligus partisipasi yang terbuka, rasional, interaktif, dan diharapkan konstruktif, terutama di kalangan pelajar berusia 17-21 tahun. Namun medsos juga sering menciptakan kegaduhan dan konflik akibat isi informasi yang tak beretika. Oleh karena itu, perlu literasi politik.

Adapun fungsi medsos dalam literasi politik, pertama, sebagai agen diseminasi informasi tentang proses politik dan kebijakan pembangunan. Kedua, jadi agen aksentuasi pandangan, pendapat bahkan sikap masyarakat terhadap fenomena politik tertentu, misalnya kasus bak-p a o .

Ketiga, medsos jadi ruang publik untuk diskusi dan literasi politik yang bebas. Keempat, medsos ikut mendorong pemajuan demokrasi dengan menjalankan fungsi kontrol sosial, misal kasus korupsi E-KTP.

Pemerintah dan masyarakat secara umum memberikan dukungan positif bagi kebebasan memanfaatkan medsos meski belakangan dipenuhi hoaks dan ujaran kebencian bermuatan SARA. Selanjutnya, agar pelajar sebagai generasi penerus mudah mengerti, memahami, mencermati, menginternalisasi, dan membawanya dalam sikap dan tindakan politik, perlu literasi politik.

Medsos pun menjadi sarana paling familier karena individu terdidik dan melek ICT akan memanfaatkan medsos untuk memenuhi rasa ingin tahu dan penasaran tentang politik dan praktik demokrasi negeri ini.

Pemilih muda atau mereka yang dikenal sebagai Generasi

Z lahir pada tahun 2000-an berada pada iklim politik kompetitif selama era internet. Tidak seperti pemilih mapan sebelumnya yang memiliki kebiasaan mengakses informasi via kampanye di media cetak dan elektronik, generasi gawai ini telah menggenggam informasi melalui media *online* dari awal.

Studi menunjukkan, pemilih muda terdepan dalam hal menggunakan media baru untuk mengakses informasi. Orang muda juga berada di garis depan inovasi pemilihan media baru dan berpartisipasi dalam kampanye melalui ranah-*ranah* media baru (Baumgartner dan Morris dlm Owen, 2014)

Hasil riset Departemen Ilmu Komunikasi (Nopember 2017) menunjukkan, mayoritas Generasi Z (49 persen) memandang politik sebagai urusan pemerintah dan perebutan kekuasaan antartokoh partai.

Terdapat 35 persen mereka yang memaknai politik sebagai strategi dan cara mewujudkan kepentingan umum melalui kebijakan seperti undang-undang. Adapun yang memaknai politik sebagai persoalan partai politik dan pemilu ada 10 persen. Temuan lain menunjukkan, 6 persen dari mereka memaknai politik sebagai perebutan jabatan dan kedudukan di pemerintahan dan DPR. Yang menarik, hanya 35 persen responden yang memandang politik sebagai hal positif, yaitu strategi dan cara mewujudkan kepentingan umum. Pandangan tersebut muncul sebelum aktivitas literasi politik diikuti para pemilih pemula.

Literasi politik adalah aktivitas sosialisasi informasi disertai diskusi tentang berbagai persoalan yang berhubungan dengan politik untuk menciptakan pribadi yang melek politik sehingga menjadi warga negara yang cerdas karena kritis, bersikap dewasa, dan konstruktif dalam memandang politik dan kekuasaan.

Hasil riset (November 2017) menunjukkan, setelah pendidikan literasi politik, terdapat respons di kalangan remaja.

Sebanyak 40 persen menilai literasi politik sebagai upaya membangun kesadaran individu agar berpartisipasi dalam politik seperti pemilu. Di samping itu, terdapat 28 persen makin memahami berbagai aktivitas yang berhubungan dengan politik dan dinamikanya.

Selebihnya, 20 persen menilai literasi politik merupakan pendidikan untuk tahu dan peduli politik untuk kebaikan bersama, terutama melalui medsos dan media arus utama.

Target dan urgensi literasi politik, pertama, menasar aspek *knowledge*, yakni perubahan dan peningkatan ranah pengetahuan dan wawasan individu tentang politik dalam beragam dinamikanya.

Kedua, lebih berupaya terjadi perubahan sikap terhadap berbagai fenomena perpolitikan di negeri ini, baik yang positif maupun yang mengkhawatirkan.

Ketiga, kesediaan individu mengubah perilaku bahkan bertindak dalam rangka memperbaiki keadaan melalui partisipasi kritis dan konstruktif pada proses pengambilan keputusan sejak berpartisipasi pada pemilu sampai mengawal visi-misi politikus terpilih. Semoga berhasil menyiapkan generasi milenial melek politik. (49)

—Muchamad Yuliyanto, dosen Komunikasi Politik FISIP Undip, Ketua Pengabdian tentang Literasi Politik 2017.

